



BAPPENAS

Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan

Dadang Solihin

Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Bappenas

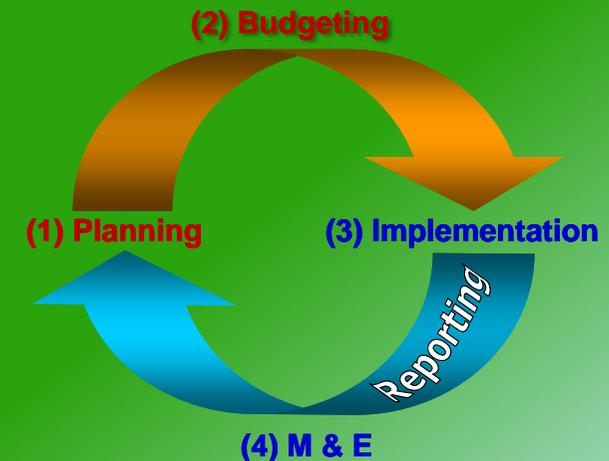
Workshop on Knowledge Sharing and Technical Skills in M&E
Novotel Bogor, 14-16 July 2008



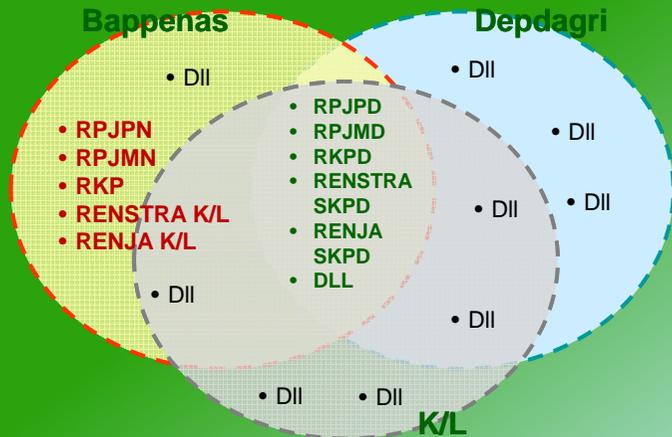
Materi

- Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan
- What need to be monitored and evaluated?
- Who does what?
- Gambaran Sistem M&E (Sekarang dan Akan Datang)
- Kendala Pelaksanaan M&E
- Masalah Potensial
- Mengembangkan Sistem M&E
- Membangun Sistem Pelaporan: E-Monev

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan



What need to be monitored and evaluated?



www.dadangsolihin.com

5

Who does what?



Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government

6

Gambaran Sistem M&E (Sekarang dan Akan Datang)

Sekarang

- Adanya berbagai macam peraturan yang mengamankan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan
 - Depdagri
 - LAN
 - Menpan
 - Departemen Keuangan
 - Bappenas
 - Setneg
 - K/L terkait
- Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi
- Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
- Evaluasi top-down
- Evaluasi fragmentasi 1 waktu
- Evaluasi pasif
- Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi

Akan Datang

- Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah
- Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif
- Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya
- Lebih efisien dan biaya rendah
- Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up
- Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi
- Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
- Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi
- Adanya komunitas evaluator

www.dadangsolihin.com

7

Kendala Pelaksanaan M&E

1. Anggaran

Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan anggaran yang dialokasikan kecil.

2. SDM

Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup.

3. Kemampuan/ Keahlian

- "Tour of duty" PNS, terutama di Pemda
- Kurangnya tenaga teknis terlatih

4. Perlengkapan/ Peralatan

Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi.

www.dadangsolihin.com

8

Kendala Pelaksanaan M&E

5. Prosedural

- Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional)
- Tidak diterimanya laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan
- Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi
- Mekanisme pelaporan yang ada antar instansi pemerintah belum memiliki pola yang jelas dan pasti.

6. Pengiriman

- Kondisi geografis
- Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/komunikasi.

Masalah Potensial

- Tidak ada referensi indikator yang cukup dalam Laporan Monitoring untuk dapat melakukan evaluasi seperti dimintakan pada Renja/ RKP;
- Pelaporan M&E memberikan beban tambahan kepada para penanggungjawab program/ kegiatan yang sudah cukup banyak beban M&E sesuai peraturan-perundangan selama ini, khususnya di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Tidak ada mekanisme umpan balik dari laporan M&E, walaupun ada penyelenggara tidak siap melakukannya.

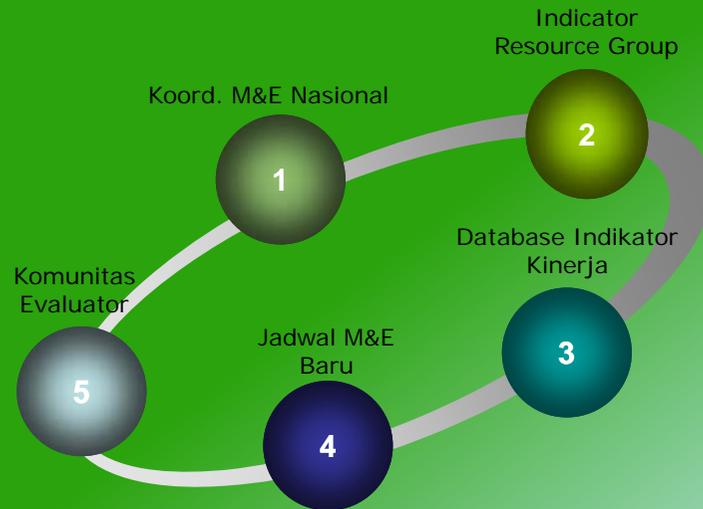
Masalah Potensial

- Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinasi kelembagaan terkait, dalam arti seluas-luasnya, yang disebabkan antara lain, kurangnya alokasi anggaran untuk M&E;
- Kurangnya motivasi dan komitmen para penanggungjawab dan pelaksana M&E;
- Tidak cukup pelatihan yang dapat disediakan untuk M&E dan untuk menentukan indikator;
- Alokasi tenaga ahli yang tidak memadai.

Mengembangkan Sistem M&E: Best Practices (MacKay, 2007)

Chile	▶ Memiliki 1.550 indikator kinerja untuk seluruh sektor (h.25).
Colombia	▶ SINERGIA: Sistem Nasional Evaluasi Kinerja Sektor Publik (h.33)
Australia	▶ Government Evaluation Strategy (h.39)
Meksiko	▶ SEDESOL: Sekretariat Pembangunan Sosial (h.61)

Mengembangkan Sistem M&E



1 Membentuk Koord. M&E Nasional

- Formalisasi koordinasi dalam proses pelaksanaan dan pengembangan M&E yang selama ini berjalan di K/L secara informal.
- Merupakan Tim Pengarah pengembangan manajemen kinerja dan indikator yang digunakan Pemerintah.
- Melaporkan mengenai arah, perkembangan dan permasalahan kepada Men. PPN.
- Terdiri dari empat anggota inti Eselon I dari Bappenas, Depkeu, Depdagri dan Menpan.
- Ditambah dua anggota tambahan akan dipilih untuk mewakili K/L, dan ini dapat berganti dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.

2 Membentuk Indicator Resource Group

- Sebagai Tim Teknis untuk menyediakan dukungan kepada seluruh K/L dalam pengembangan indikator dan proses M&E.
- Merupakan Tim Nasional Konsultasi Indikator yang akan bertugas:
 1. menyusun suatu standar pendekatan dan kriteria yang digunakan dalam perumusan indikator pembangunan nasional dan daerah,
 2. menjadi tempat penyimpanan indikator yang sudah didefinisikan sebagai alat ukur program-program dan kegiatan-kegiatan.
 3. Mereview umpan balik pada penggunaan indikator setelah setiap langkah besar dalam proses perencanaan dan penerapan rencana, dan akan memasukkan bahan belajar dari pengalaman ke dalam proses.

3 Membangun Database Indikator Kinerja

- Banyaknya indikator dari proses alokasi sumber daya dapat dikontrol.
- Perkembangan dari sebuah indikator dapat ditelusuri sehingga perubahannya dapat menjadi bukti bagi pengguna.
- Sebagai alat bagi K/L ketika menyusun indikator untuk kegiatan-kegiatan baru
- Sebagai alat untuk membantu sumber daya teknis dalam mengembangkan indikator baru
- Indikator program dan indikator kegiatan dapat diselaraskan dengan indikator perencanaan

4

Menyusun Jadwal M&E Baru

- Dibutuhkan jadwal M&E baru seiring dengan kompleksitas fungsi-fungsi manajemen K/L, Pemda dan SKPD.
- Meningkatnya kebutuhan pelaporan yang makin rumit.
- Pemilihan satu wilayah percontohan, menerapkan jadwal M&E baru dan memanfaatkan umpan balik sebelum dilaksanakan di seluruh wilayah.

5

Mendirikan Komunitas Evaluator

- Mendirikan Asosiasi Evaluator Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur:
 1. Pemerintah
 2. Dunia Usaha
 3. Masyarakat
- Melahirkan Jabatan Fungsional Evaluator (JFE)
- Mendirikan Asosiasi Evaluator Pemerintah Indonesia (AEPI)

Membangun Sistem Pelaporan: E-Monev

go.id BASE



1. Phase Analog
 - a. Menyusun pelaporan sebagaimana yang dilakukan saat ini, tetapi tidak dikirimkan atau diantarkan ke K/L pengumpul, melainkan diupload pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim.
 - b. Uploading berbagai indikator pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim
2. Phase Digital
 - Data base M&E



Dibutuhkan password untuk mengakses data bagi level tertentu. Mis. Presiden, Menteri, Dirjen, dst

Terima Kasih

Dadang Solihin's Profile



Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas.

- Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
- He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
- You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com